

Sosialisasi Arah Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam Percepatan Penurunan Kemiskinan Ekstrem Melalui Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni dan Penanganan Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh Terintegrasi

Socialization of the Policy Direction of Self-Help Housing Stimulant Assistance (BSPS) in Accelerating the Reduction of Extreme Poverty through Improving the Quality of Non-Habitable Homes and Handling Integrated Housing and Slum Settlement Areas

Seri Mughni Sulubara¹, T. Saiful Basri², Zulfa Zainuddin³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh

Korespondensi penulis: mughniseri@gmail.com¹

Article History:

Received: 11 April 2024

Accepted: 03 Mei 2024

Published: 30 Juni 2024

Keywords: *Self-Help Housing Stimulant Assistance (BSPS), Poverty, Uninhabitable Houses (RTLH)*

Abstract: *This community service was carried out for the community in Negeri Antara and Pancar Jelobok Villages, Pintu Rime Gayo District, Bener Meriah Regency. The problems faced are the poverty level and the quality of uninhabitable houses (RTLH) for low-income people (MBR). The research objective is to provide socialization of self-help housing stimulant assistance (BSPS) in overcoming poverty levels and improving the quality of uninhabitable houses and handling integrated housing and slum areas. The method used is descriptive research with a qualitative approach with a sampling technique that uses purposive sampling technique. The results of the research are that the people of Negeri Antara and Pancar Jelobok Villages, Pintu Rime Gayo District, Bener Meriah Regency are very enthusiastic and feel helped by the existence of Self-Help Housing Stimulant Assistance (BSPS) so that they are provoked/motivated to make livable houses with the assistance provided by the government.*

Abstrak

Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan terhadap masyarakat di Desa Negeri Antara dan Pancar Jelobok Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah. Permasalahan yang dihadapi adalah tingkat kemiskinan dan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Tujuan penelitian adalah untuk memberikan sosialisasi bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) dalam mengatasi tingkat kemiskinan dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dan penanganan kawasan perumahan dan permukiman kumuh terintegrasi. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengambilan sampel yang menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian adalah masyarakat Desa Negeri Antara dan Pancar Jelobok Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah sangat antusias dan merasa terbantu dengan adanya Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sehingga mereka terpancing/termotivasi untuk membuat rumah yang layak huni dengan bantuan yang diberikan oleh pemerintah.

Kata kunci: Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Kemiskinan, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

LATAR BELAKANG

Ketidakmerataan dalam pembangunan nasional tidak terlepas dari masalah kemiskinan. Jika dalam suatu pembangunan nasional tidak memikirkan masalah kesejahteraan dan pemerataan ekonomi maka efeknya adalah masalah-masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1), bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang merupakan hasil revisi UU No. 4 Tahun 1992

*Seri Mughni Sulubara, mughniseri@gmail.com

tentang Perumahan dan Permukiman menegaskan bahwa rumah adalah salah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat (B & Sadriah, 2020). Program BSPS adalah bantuan pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah agar mampu meningkatkan keswadayaan sehingga rumah dan pembangunan baru rumah, sarana dan prasarana serta utilitas umum memiliki kualitas. Program BSPS ditujukan untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) agar dapat ditempati dan layak huni, mendorong masyarakat secara swadaya mengerjakan serta mengawasi sendiri pembangunan rumahnya (Hutagalung & Sari, 2021).

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disingkat BSPS adalah bantuan pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya adalah program pemerintah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang disingkat MBR. Masyarakat Berpenghasilan Rendah adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. BSPS pada prinsipnya berupaya mendorong prakarsa dan upaya masyarakat agar memiliki kemampuan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi sendiri pembangunan rumahnya secara swadaya. Hal ini diperuntukan bagi rumah tidak layak huni menjadi rumah yang layak huni (Johny, 2019). Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) bisa disebut juga dengan masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) (Farida, 2020).

Permasalahan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) masih menjadi permasalahan yang harus segera ditangani oleh pemerintah. Kebutuhan akan perumahan dan permukiman semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Namun pemenuhan kebutuhan akan perumahan dan permukiman tersebut tidak seimbang dengan pendapatan masyarakat dan pengetahuan masyarakat tentang rumah layak huni sehingga menyebabkan munculnya permukiman kumuh dan semakin banyaknya rumah tidak layak huni di banyak tempat khususnya di Desa Pancar Jelobok dan Negeri Antara Kecamatan Pintu Rime Gayo (Mulyadi, 2020). Program BSPS ini merupakan bantuan stimulan atau bantuan perangsang bagi masyarakat, maka dari itu masyarakat perlu mempersiapkan keswadayaannya demi tercapainya pembangunan.

Kemiskinan dan rumah tidak layak huni menjadi salah satu masalah sosial di Desa Pancar Jelobok dan Negeri Antara Kecamatan Pintu Rime Gayo. Dengan demikian, kemiskinan dan rumah tidak layak huni menjadi salah satu tema utama pembangunan. Keberhasilan dan kegagalan pembangunan diukur berdasarkan perubahan pada tingkat kemiskinan. Dalam rangka mewujudkan hunian yang layak bagi semua orang pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan fasilitasi kepada masyarakat agar dapat menghuni rumah yang layak, sehat, aman, terjamin, mudah diakses dan terjangkau yang mencakup sarana dan prasarana pendukungnya melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Berdasarkan hal tersebut diatas, Penulis mencoba mengangkat judul penelitian kegiatan masyarakat yang berjudul “*Sosialisasi Arah Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam Percepatan Penurunan Penurunan Kemiskinan Ekstrem Melalui Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni dan Penanganan Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh Terintegrasi*”.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hal ini didasarkan pada maksud untuk mendeskripsikan realita sosial dan kongkrit. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan

fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami kejadian-kejadian yang terjadi atau dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, konsep diri, tindakan, kinerja dan lain-lain. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dengan memanfaatkan latar alamiah dan dengan menggunakan metode alamiah. Jenis penelitian yang digunakan penelitian adalah bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, yang dijadikan populasi adalah kepala keluarga penerima Program Bantuan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang bertempat tinggal di Desa Pancar Jelobok dan Desa Negeri Antara Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, maka dalam penelitian ini menggunakan sampel dengan karakteristik informan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

HASIL

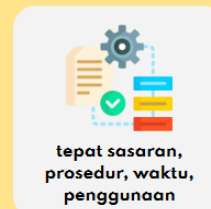
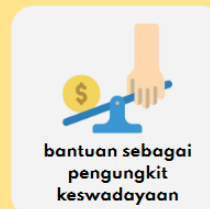
Fenomena kemiskinan selalu menjadi sebuah topik yang menarik untuk menjadi bahan perbincangan, permasalahan terkait kemiskinan merupakan suatu permasalahan sosial yang selalu menjadi bahan untuk terus menerus di kaji. Kemiskinan masih menjadi masalah yang sering terjadi, terutama pada negara yang masih dalam status negara berkembang, Indonesia menjadi salah satunya negara dengan status tersebut. Kemiskinan sebagai suatu keadaan dimana tidak memiliki keterjaminan dalam pendapatan, kebutuhan dasar yang kurang berkualitas, asset-aset produktif dan rendahnya kualitas perumahan, tidak mampu dalam memelihara Kesehatan yang baik, tidak adanya jaringan atau dukungan untuk mendapatkan hak nya dalam memiliki kehidupan yang layak, kurangnya infrastruktur dan keterpencilan. Pertumbuhan penduduk tiap tahunnya cenderung terus mengalami peningkatan, keadaan yang seperti itu akan menimbulkan ragam permasalahan (Viyulia et al., 2023).

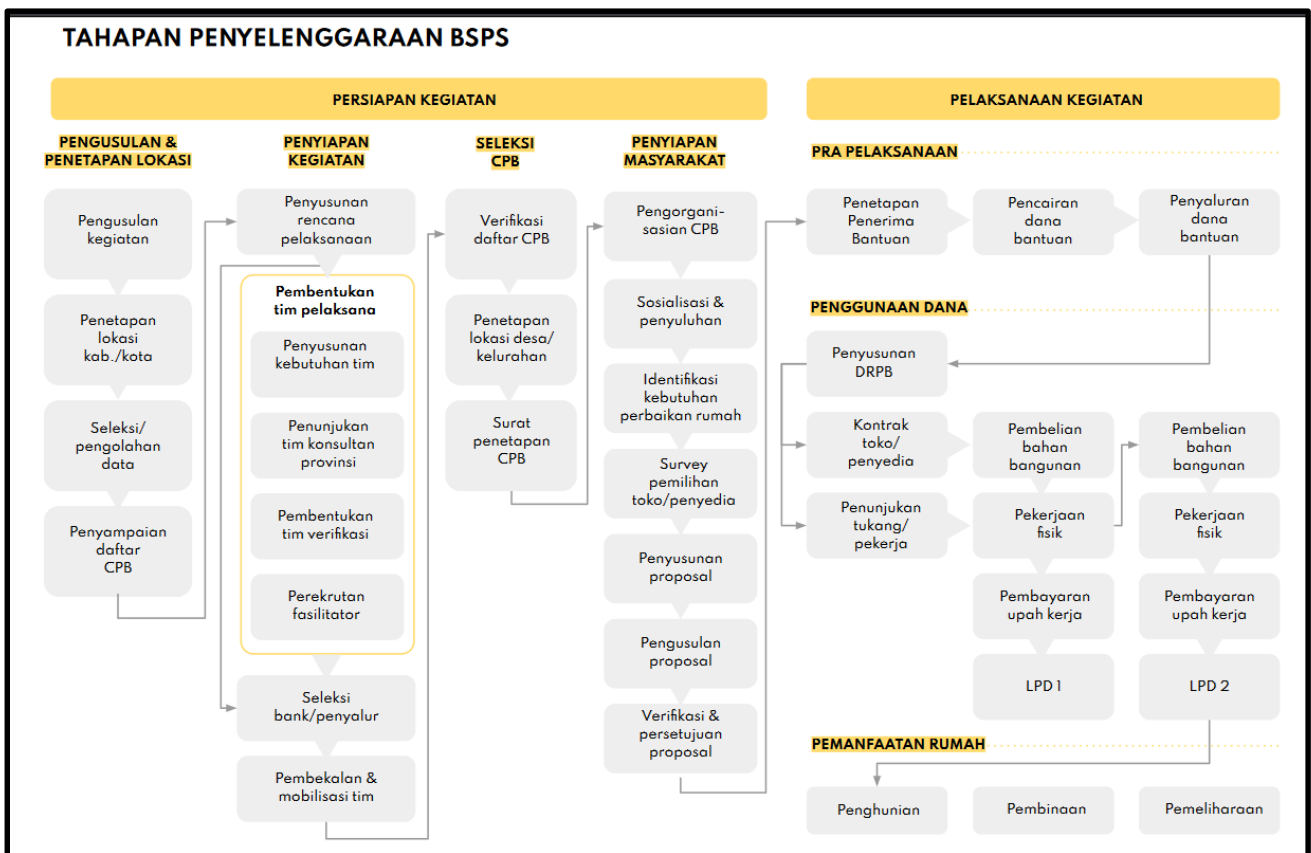
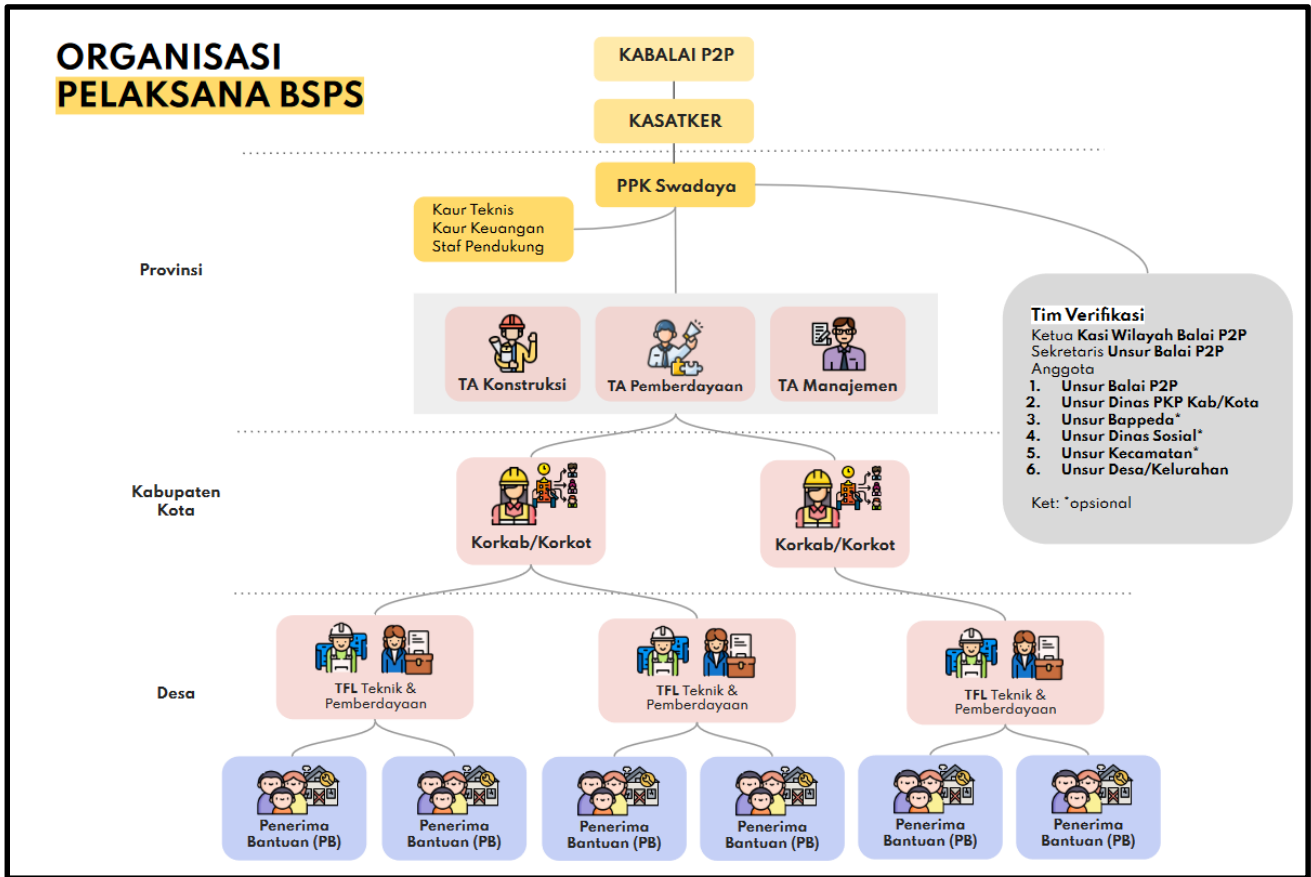
PENDEKATAN KEGIATAN

Penyelenggaraan BSPS dilaksanakan dengan memperhatikan:

- 1) Bertujuan **meningkatkan keswadayaan masyarakat** untuk mewujudkan rumah layak huni, berdasarkan kemampuan masyarakat.
- 2) Pengukuran terhadap:
 - a) **tingkat keswadayaan masyarakat;**
 - b) **kualitas rumah** berupa pemenuhan kriteria RLH
- 3) **Keterlibatan berbagai pihak** dalam pelaksanaan yaitu KPB, pendamping masyarakat, pemerintah desa/ kelurahan, pemerintah kecamatan, pemkab/pemkot, konsultan provinsi, bank/pos penyalur, satker, BP2P, dan direktorat jenderal sesuai kapasitas dan kewenangan
- 4) **Target dan capaian pengurangan RTLH** yang ditetapkan dalam RPJMN atau Renstra melalui pemberian akses perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau.
- 5) Pelaksanaan kegiatan yang mengacu pada RPJMN yang dilaksanakan per tahun untuk mencapai **kualitas hunian yang layak sebesar 70%** pada tahun 2024.

PRINSIP BSPS





PERSYARATAN PENERIMA BSPS

- 1 WNI yang sudah berkeluarga (penghuni rumah yang terdaftar dalam satu KK) atau keluarga yang hanya beranggotakan 1 orang penyandang disabilitas atau minimal berusia 58 tahun
- 2 Memiliki/menguasai tanah dengan alas hak yang sah seperti sertipikat, akta hibah, akta jual beli, NIB, izin kepala adat, atau bukti lainnya yang sah
- 3 Berpenghasilan maksimal sebesar UMP atau UMK
- 4 Memiliki & menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni, dan telah dimiliki dan dihuni minimal selama 3 tahun
- 5 Belum pernah memperoleh BSPS/bantuan pemerintah untuk program perumahan dalam 10 tahun terakhir, kecuali terdampak bencana atau berdasarkan ketentuan UU;
- 6 Bersedia berswadaya dan membentuk KPB dengan pernyataan tanggung renteng

Tujuan penggunaan bantuan adalah mendorong & meningkatkan keswadayaan masyarakat agar memiliki akses dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni secara swadaya

Bentuk Keswadayaan



Bentuk keswadayaan dapat berupa tanah yang dimiliki/dikuasai; tenaga kerja; modal sosial; tabungan bahan bangunan.

Bagi masyarakat pra sejahtera, keswadayaan berupa tanah dan dapat ditambahkan bahan bangunan bekas layak pakai yang dapat diperoleh dari anggota KPB atau sumber

Persyaratan KPB

1. Dibentuk dan disepakati melalui rembug warga;
2. terdiri atas unsur ketua, sekretaris, bendahara (ketiganya merangkap anggota), dan anggota;
3. anggota KPB maksimal 20 orang atau mempertimbangkan kondisi lapangan
4. anggota KPB bertempat tinggal di desa/kelurahan yang sama;
5. Gotong royong untuk menanggung segala resiko bersama-sama (tanggung renteng) dalam menuntaskan kegiatan perumahan swadaya.



Dalam pelaksanaan program ini dilakukan di Desa Negeri Antara dan Pancar Jelobok Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah. Sumber daya manusia mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan program BSPS. Sumber daya lainnya yang dimaksud selain sumber daya manusia terdapat juga sumber daya berupa uang serta sarana/prasarana. Untuk melaksanakan kebijakan dengan baik dibutuhkan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai.

Pelaksanaan kegiatan BSPS di Desa Negeri Antara Pancar Jelobok Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah bukanlah pembangunan rumah swadaya (PBRs) baru, melainkan peningkatan kualitas rumah swadaya (PKRS) dengan memperbaiki rumah tidak layak huni dan menjadikannya layak huni. Perumahan Swadaya adalah kumpulan rumah swadaya sebagai bagian dari permukiman baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan PSU. (Pemen PUPR 7/PRT/M/2018 tentang BSPS) (Hara, 2020). Bangunan tetap dengan struktur hunian, kesehatan penghuni, akses penerangan dan sanitasi serta luas bangunan yang cukup minimal 36M². Penetapan Calon Penerima Bantuan dilakukan setelah proposal diajukan oleh calon penerima BSPS berdasarkan hasil verifikasi dan identifikasi oleh fasilitator lapangan.

Adapun bentuk bantuan program BSPS adalah uang senilai Rp. 17.500.000, hal tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 158/KPTS/M/2019 Nilai Bantuan program BSPS di tahun 2019. Penyaluran dana dilakukan melalui bank aceh yang masing-masing penerima bantuan dibuatkan buku rekening tabungan dari bank aceh yang telah bekerja sama dengan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Aceh tanpa ada pungutan biaya atau gratis. Dengan demikian, bentuk swadaya dalam program BSPS bisa berupa uang, barang dan tenaga (Robiansyah et al., 2022).

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Negeri Antara dan Pancar Jelobok Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah dari pemerintah bagi penyelenggaraan rumah swadaya merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan mengantisipasi masalah perumahan. Bagi masyarakat penerima rumah bantuan diharapkan sebuah komitmen untuk memanfaatkan bantuan ini dengan sebaik-baiknya sesuai tujuannya dan diharapkan nantinya akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima rumah bantuan tersebut (Kartius & Oktaviani Bullu, 2021). Dalam proses pemanfaatan bantuan stimulan perumahan swadaya di Desa Negeri Antara dan Pancar Jelobok Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah sudah terimplementasi sesuai dengan Petunjuk Teknis yang berlaku dan sudah memanfaatkan dana bantuan dengan baik seluruh penerima bantuan sudah melaksanakan pembangunan 100% tidak melewati waktu akhir tahun anggaran, data progres pembangunan dari 0% hingga 100% rumah seluruh penerima bantuan di Desa tersebut (Setiyarini & Prathama, 2019).

Sumber dana untuk pembiayaan Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya adalah Dana Alokasi Khusus (DAK), yaitu dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana ini dimaksudkan untuk membantu membiayai (Di et al., 2018). Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) diatur dalam Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. BSPS adalah bantuan Pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana dan sarana (Khairunnisa & Hayati, 2021), dimana sasaran yang menerima bantuan BSPS sudah sesuai dengan kriteria yang ada yaitu masyarakat berpenghasilan rendah. Namun dalam pelaksanaan program masih sudah optimal dimana perekrutan penerima bantuan

sudah terealisasi semuanya dan adanya kesiapan masyarakat menerima bantuan ini (Desyra et al., 2021).

Berdasarkan temuan peneliti dilapangan dalam proses pelaksanaan program BSPS kriteria penerima manfaat sudah sesuai dengan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan BSPS yaitu warga negara Indonesia, memiliki tanah, berpenghasilan paling banyak sebesar Upah Minimum Daerah, belum pernah memperoleh bantuan lain dari pemerintah dan lainnya (Mamonto et al., 2022). Tujuan dari adanya program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ini yaitu ingin membantu masyarakat yang belum memiliki rumah layak huni, untuk mendapatkan rumah layak huni. Untuk itu program ini memiliki sasaran dalam menjalankan fungsinya, seperti yang menjadi sasaran adalah masyarakat penerima bantuan itu sendiri, pemerintah setempat serta perangkat desa. Oleh karena itu program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini sudah dapat membantu dan mempercepat proses pembangunan rumah (Azmalina et al., 2023)



Gambar 1. Sosialisasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Negeri Antara dan Pancar Jelobok Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah



Gambar 2. Sosialisasi Kriteria Masyarakat Penerima Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)



Gambar 3. Sosialisasi Syarat-Syarat Berkas Untuk Usulan Proposal Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

DISKUSI

Mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus, Program BSPS merupakan dukungan dana dari pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk peningkatan kualitas rumah swadaya berasaskan kegotong-royongan. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri PUPR Nomor 115/KPTS/M/2022 tentang Besaran Nilai dan Lokasi BSPS Tahun Anggaran 2022, ditetapkan bahwa besaran nilai BSPS terbagi menjadi tiga, sebagai berikut:

1. Pertama, lokasi reguler di luar Papua dan Papua Barat senilai Rp20 juta. Dengan alokasi untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp17,5 juta dan Rp2,5 juta untuk upah pekerja.
2. Kedua, untuk lokasi khusus kawasan datar di perkotaan dan pedesaan Provinsi Papua dan Papua Barat, nilainya sebesar Rp23,5 juta. Dengan alokasi pembelian bahan bangunan sebesar Rp18,5 juta dan Rp5 juta untuk upah pekerja.
3. Ketiga, untuk lokasi penyaluran BSPS khusus kawasan pulau-pulau kecil, daerah terpencil dan pegunungan di Provinsi Papua dan Papua Barat senilai Rp40 juta. Dengan rincian Rp35 juta untuk pembelian bahan bangunan, serta Rp5 juta untuk upah pekerja. Kriteria Penerima Bantuan BSPS mengacu pada UU No.1 Tahun 2011, berikut ini adalah kriteria penerima bantuan BSPS.

1. Subjek adalah pemilik dan penghuni rumah harus memenuhi kriteria berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia (WNI), sudah berkeluarga
 - b. Masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR)
 - c. Bersedia membentuk kelompok
 - d. Belum pernah atau sedang menerima bantuan sejenis dari pemerintah Diutamakan yang telah memiliki keswadayaan dan berencana membangun/meningkatkan kualitas rumahnya.
2. Objek adalah bangunan rumahnya memenuhi kriteria berikut:
 - a. Rumah milik sendiri, satu-satunya dan dihuni
 - b. Kerusakan pada komponen utama bangunan rumah (atap, lantai, dinding)
 - c. Kelengkapan komponen struktural bangunan

- d. Kepemilikan lahan tempat bangunan rumah berada atau akan dibangun
- e. Lokasi sesuai dengan rencana tata ruang.



Gambar 4. Sosialisasi Ciri-Ciri Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Penerima Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).



Gambar 5. Sosialisasi Subjek dan Objek Penerima Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).



Gambar 6. Sosialisasi Keputusan Hasil Verifikasi Kepala Keluarga (KK) Penerima Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Tujuan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya adalah untuk memberdayakan MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) agar mampu membangun atau meningkatkan kualitas rumah secara swadaya sehingga dapat menghuni rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat dan aman. Pemerintah perlu lebih berperan dalam menyediakan dan memberikan kemudahan dan bantuan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang berbasis kawasan serta keswadayaan masyarakat sehingga merupakan satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi daerah, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Aceh disini mengelola anggaran yang berasal dari dana alokasi khusus (DAK) yang dimana anggaran ini berasal dari Kementerian PUPR sedangkan anggaran program bedah rumah yang berasal dari anggaran Reguler dikelola oleh Satker Provinsi dan anggaran BSPS strategis di kelola oleh Satker Pusat. Peran bidang perumahan bukan hanya sekedar memberi dana melainkan bidang ini yang menyiapkan material material apa saja yang dibutuhkan untuk proses pembedahannya sampai selesai di Desa Negeri Antara dan Pancar Jelobok Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah.

KESIMPULAN

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Desa Negeri Antara dan Desa Pancar Jelobok Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah ini memiliki dan menuai berbagai respon di masyarakat. Dari mulai disebarkan informasi terkait dengan bantuan ini pemerintah kota, kelurahan, desa maupun masyarakat umum sangat antusias dan senang sekali hal ini terlihat dari laporan perangkat setempat. Respon masyarakat merasa terbantu dengan adanya Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya sehingga mereka terpancing/termotivasi untuk membuat rumah yang layak huni. Dari hasil yang di dapat peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan rumah swadaya di Negeri Antara dan Pancar Jelobok Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah dapat dikatakan sudah berjalan efisien.

DAFTAR REFERENSI

- Azmalina, T. P., Ayuh, E. T., Mayasari, R. T., & Yuliani, H. (2023). Peran Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dalam Mensosialisasikan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari*, 4(2), 67–73. <https://doi.org/10.31539/joppas.v4i2.6167>
- B, I., & Sadriah, S. (2020). Pengaruh Efektivitas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Bsp) Terhadap Pengentasan Kemiskinan. *Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA)*, 2(2), 103–116. <https://doi.org/10.31605/jepa.v2i2.661>
- Desyra, T. E., Dengo, S., & Londa, V. Y. (2021). Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Dalam Penyediaan Rumah Layak Huni di Desa Tolok Satu Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa. *JAP: Unsrat*, 7(110), 35–45.
- Di, B., Subulussalam, K., & Aceh, P. (2018). Evaluasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Bsp) Di Kota Subulussalam Provinsi Aceh. *Jurnal Prointegrita*, 6(3). <https://doi.org/10.46930/jurnalprointegrita.v6i3.2430>
- Farida, I. (2020). Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Di Kabupaten Subang. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 7, 35–47.
- Hara, K. M. (2020). Pengaruh Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Pada Masyarakat di Kelurahan Lowulowu Kecamatan Lealea Kota Baubau. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 5(2), 73–81. <https://doi.org/10.35326/pencerah.v5i2.541>
- Hutagalung, J., & Sari, U. F. (2021). Penerapan Metode K-Means dan MOORA Dalam Penerimaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). *Jurnal Nasional Informatika Dan Teknologi Jaringan*, 6(1), 31–41. <https://doi.org/10.30743/infotekjar.v6i1.4093>
- Johny, lumolos dkk. (2019). Pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya (bsp) di kecamatan amurang timur kabupaten minahasa selatan. *Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 3(3), 1–7.
- Kartius, & Oktaviani Bullu, I. (2021). PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN STIMULANT PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DALAM PENYEDIAAN RUMAH BANTUAN DI DESA KOTO PERAMBAHAN KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR Rozi. *Jurnal Kemunting*, 3(1), 341–348.
- Khairunnisa, I., & Hayati, R. (2021). Evaluasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Mangkusip Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong. *Jurnal Stia Tabalong*, 4(2), 1424–1435.
- Mamonto, D. M., Abdussamad, J., & Dance Tui, F. P. (2022). Implementasi Program Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kabupaten Bone Bolango. *Provider Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 57–66. <https://doi.org/10.59713/projip.v1i2.266>
- Mulyadi, A. (2020). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kota Sukabumi. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 3777(November), 744–754. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat>
- Robiansyah, I., Suryapermana, N., & Sudrajat, B. (2022). Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Pandeglang (Studi di Desa Ciherang Kecamatan Picung Kabupaten

Pandeglang). *Tsarwah*, 7(1), 12–19. <https://doi.org/10.32678/tsarwah.v7i1.6567>

Setiyarini, A. W., & Prathama, A. (2019). Implementasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Desa Sambigede Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur. *Public Administration Journal of Research*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.33005/paj.v1i1.2>

Viyulia, Arenawati, & Sjafari Agus. (2023). Menurunkan Angka Kemiskinan Melalui Program BSPS di Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Niara*, 16(1), 1–13.